

# Departemen Tenaga Kerja A.S.

## Temuan 2023 mengenai Bentuk Kerja Anak Terburuk

### Indonesia

Pada 2023, Indonesia membuat kemajuan yang moderat dalam upaya menghilangkan bentuk terburuk kerja anak. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama dengan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, menerbitkan Analisis Lanskap Anak Penyandang Disabilitas pertama di Indonesia yang mencakup rekomendasi untuk menanggapi dan mencegah pengucilan dan eksploitasi anak penyandang disabilitas. Pemerintah juga mengalokasikan \$150.000 untuk program rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang selamat dari perdagangan manusia. Selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja meningkatkan anggaran untuk inspektorat ketenagakerjaan dari \$15,1 juta pada tahun 2022 menjadi \$22,7 juta pada tahun 2023, menggunakan dana tambahan untuk melakukan inspeksi dan penyelidikan, serta untuk membangun kapasitas inspektur ketenagakerjaan. Tetapi, Kementerian Tenaga Kerja masih kekurangan sumber daya finansial dan personil yang perlu untuk sepenuhnya menegakkan hukum tenaga kerja anak di seluruh negara. Selain itu, larangan perdagangan anak di Indonesia juga tidak sejalan dengan standar internasional karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia mewajibkan pembuktian dari ancaman, penggunaan kekerasan atau pemaksaan untuk menetapkan bahwa tindak pidana perdagangan anak terjadi. Akhirnya, hukum Indonesia tidak konsisten dengan hukum internasional karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memungkinkan siswa dikenai pungutan biaya pendidikan.

Tindakan pemerintah yang disarankan di bawah ini akan menutup kesenjangan yang telah diidentifikasi USDOL dalam implementasi komitmen internasional Indonesia untuk menghilangkan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.

Bidang	Tindakan yang Disarankan
Kerangka Kerja Hukum	Memastikan ancaman, penggunaan kekuatan, atau pemaksaan tidak harus dibuktikan untuk kejahatan perdagangan anak.
	Termasuk dalam daftar pekerjaan dan kegiatan berbahaya yang dilarang untuk anak-anak di semua sektor di mana kerja anak diketahui berlangsung, termasuk joki untuk balapan kuda.
	Memperinci di dalam peraturan hukum tenaga kerja kegiatan di mana pekerjaan ringan diizinkan untuk anak-anak.
	Menetapkan lewat hukum pendidikan dasar publik gratis dengan menghapus ketentuan yang mengizinkan sekolah untuk membebaskan biaya, dan memastikan bahwa pendidikan dasar negeri disediakan gratis untuk semua siswa terlepas dari status kewarganegaraan atau tempat tinggal.
Penegakan	Memastikan pendanaan inspektorat tenaga kerja cukup untuk mencakup infrastruktur kantor, transportasi, dan kebutuhan bahan bakar sehingga memberdayakan para inspektur tenaga kerja melaksanakan inspeksi.

Bidang	Tindakan yang Disarankan
	<p>Meningkatkan jumlah inspektur tenaga kerja dari 1.467 ke 9.047 untuk menyediakan lingkup yang memadai untuk sekitar 135,7 juta pekerja.</p> <p>Secara hukum memberi wewenang kepada inspektur ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi di sektor informal, termasuk di pertanian dan rumah swasta, dan memastikan bahwa aparat penegak hukum ketenagakerjaan memiliki mekanisme untuk menjatuhkan penalti perdata.</p> <p>Memastikan semua personil penegak hukum pidana menerima pelatihan yang memadai dalam aturan-aturan tenaga kerja anak dan undang-undang kejahatan terkait.</p> <p>Memperkuat sistem inspeksi ketenagakerjaan dengan melakukan inspeksi mendadak dan dengan memastikan bahwa inspeksi rutin ditargetkan pada sektor-sektor di mana pekerja anak diketahui terjadi.</p> <p>Mempublikasikan informasi dan data tentang penegakan hukum pidana setiap tahun.</p> <p>Menyediakan sumber daya untuk pengumpulan dan sentralisasi data nasional tentang pekerja anak, mewajibkan pelaporan berdasarkan wilayah hukum daerah, dan memperinci kejahatan pekerja anak mana yang direferensikan dalam data yang dikumpulkan.</p> <p>Mendanai secara cukup gugus tugas anti-perdagangan manusia pada tingkat nasional, provinsi dan setempat untuk melakukan penyidikan-penyidikan dan menjalankan mandat yang dimaksudkan.</p>
Program Sosial	<p>Melakukan penelitian untuk lebih memahami jumlah anak yang terlibat dalam pekerja anak dan bentuk-bentuk terburuknya dan kegiatan di mana mereka terlibat, dan memastikan bahwa penelitian tersebut mencakup informasi tentang pekerja anak antara usia 5 dan 10 tahun. Menyelaraskan temuan penelitian dengan temuan dari LSM internasional dan lokal dan menggunakan temuan tersebut untuk menginformasikan kebijakan dan program sosial.</p> <p>Mengembangkan dan menerapkan program sosial untuk mengatasi dan mencegah pekerja anak di antara populasi migran internal dan eksternal, termasuk pekerja anak migran dalam penangkapan ikan lepas pantai, pertambangan, pekerjaan rumah tangga, konstruksi, penjualan dan pengangkutan obat-obatan terlarang, dan dalam eksploitasi seksual komersial.</p> <p>Menghilangkan hambatan pendidikan dan membuat pendidikan dapat diakses oleh semua anak dengan mengambil langkah-langkah untuk menghapus uang sekolah, memperluas pendaftaran kelahiran dan identifikasi nasional untuk pengungsi dan anak-anak Indonesia yang tidak memiliki dokumentasi kelahiran yang layak, dan meningkatkan sumber daya untuk siswa penyandang disabilitas.</p> <p>Melaporkan secara publik hasil Standar Layanan Minimum Program Pendidikan Dasar dan Program Pusat Pembelajaran Masyarakat.</p>